

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Islam bukan sekedar penyaluran naluri seks, melainkan juga perintah agama dan bernilai ibadah agar pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan terpelihara ketakwaannya.<sup>1</sup> Salah satu yang dilindungi demi kemaslahatan manusia adalah memelihara keturunan, untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, bagaimana cara-cara pernikahan itu dilakukan dengan rukun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan harus diperhatikan rukun dan syaratnya atau prosedur-prosedur akad nikah baik ketentuan dalam hukum Islam maupun ketentuan resmi yang diberlakukan pada masyarakat Indonesia berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya umat Islam Indonesia.

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad apapun. Begitu juga dalam hal pernikahan yang merupakan dasar bagi sahnyanya suatu pernikahan. Jika satu rukun atau satu syarat saja tidak ada, maka akadnya batal. Di antara lima rukun pernikahan itu adalah adanya dua orang saksi.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke- 5, h. 32.

<sup>2</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persaksian dalam pernikahan tidak boleh cacat dan akad menjadi tidak sah tanpa persaksian. Andaikata yang dilakukan hanya pengiklanan dan pengumuman nikah tanpa persaksian pada akad maka akadnya batal. Persaksian ketika berlangsungnya akad menurut mayoritas *fuqaha* wajib bagi keabsahannya.<sup>3</sup>

Keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas ke-Islam-an, yaitu menetapi kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjurannya dengan cara menjauhkan perkara-perkara yang makruh dan haram.<sup>4</sup>

Adapun *fuqaha*, maka mereka mengatakan sesungguhnya keadilan itu kaitannya adalah kesalehan dalam agama dan bersifat *muruah*. Kesalehan dalam agama terjadi dengan ditunaikannya yang fardhu dan yang sunnah, menjahui yang diharamkan dan dimakruhkan, serta tidak melakukan dosa besar dan tidak menetap dosa-dosa yang kecil. Sedangkan *muruah* ialah hendaknya seseorang melakukan apa yang menghiasi dirinya dan juga meninggalkan apa yang menjelek-jelekkan dirinya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan<sup>5</sup>

Jumhur ulama sepakat untuk menjadikan adil sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq [65]: 2 yang berbunyi:

<sup>3</sup> Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, ( Jakarta: Amzah, 2009 ), cet. ke-1, h . 101.

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-Mujtahid*, alih bahasa oleh M.A. Abdurrahman, dan A. Haris Abdullah, ( Semarang: CV. Asy Syifa', 1990 ), cet. ke-1, jilid 3, h. 684.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), cet. ke-20, jilid 14, h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar”.<sup>6</sup>

Eksistensi saksi yang adil menurut ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali adalah suatu keharusan dalam pernikahan. Dasar persoalan ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانِكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ  
عَدْلٍ<sup>7</sup> ( رواه ابن حبان )

Artinya: “Dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda: tidak (sah) pernikahan, kecuali dengan kehadiran seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Ibnu Hibban)

Dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.<sup>8</sup>

Sebagaimana di dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tersebut, adil termasuk salah satu dari syarat saksi nikah dan yang mesti diperhatikan. Pada

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015), h. 558.

<sup>7</sup> Amir Alaidin Ali, *Shahih Ibnu Hibban*, (Bairut-Libanon: Dar al-Fikr, 1996), cet. ke-1, jilid 4, h. 310.

<sup>8</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2003), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada penjelasan mengenai kriteria adil bagi saksi nikah.

Jika dihubungkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam melaksanakan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.<sup>9</sup> Maka Kantor Urusan Agama harusnya mempunyai landasan yang jelas mengenai standarisasi saksi yang adil.

Pemeriksaan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah ditulis dalam daftar pemeriksaan (model NB). Pemeriksaan dilakukan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah, sementara saksi hanya diminta data-datanya saja. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah dan ditandatangani oleh PPN, calon suami, calon istri, dan wali nikah. Mengenai adilnya saksi dilihat dari sisi penampilan dan anggapan bahwa saksi itu orang yang baik.<sup>10</sup>

Penunjukan saksi nikah dilakukan dalam majlis ketika akan melangsungkan akad nikah, pihak Kantor Urusan Agama menerima saksi tersebut dengan berhusnuzan terhadap keadilan saksi yang telah dipilih oleh pihak keluarga calon mempelai.<sup>11</sup> Pemeriksaan saksi memang tidak dilakukan secara mendetail di Kantor Urusan Agama, akan tetapi melihat dari identitas

<sup>9</sup> Pasal 3 (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>10</sup> Khofify, Kepala KUA Tampan, *Wawancara*, 21 November 2017.

<sup>11</sup> Mas'adi, Penghulu KUA Pekanbaru Kota, *Wawancara*, 14 Desember 2017.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksi tersebut selagi masih Islam dan orang tersebut dianggap baik maka dia diterima sebagai saksi.<sup>12</sup>

Dengan demikian pengawasan dan pencatatan dari pihak Kantor Urusan Agama untuk memeriksa dan meneliti syarat adil bagi saksi nikah serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan tentang halangan perkawinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik menurut hukum syara' (hukum munakahat) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis ingin mengetahui sejauh mana pemeriksaan dan penerapan syarat adil bagi saksi nikah di Kantor Urusan Agama tersebut. Dalam hal pemenuhan syarat adil bagi saksi dalam pernikahan, apa upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama untuk menentukan adil atau tidaknya saksi dan bagaimana standarisasi saksi yang adil. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ini dan menuangkan dalam judul ***"Penerapan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru"***.

#### B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini dan agar tidak terjadi penyimpangan yang jauh dari pokok permasalahan, maka dibatasi penelitian ini terkait verifikasi dan pandangan Pegawai Pencatat Nikah serta penerapan syarat adil bagi saksi nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Tampan, dan Marpoyan Damai.

<sup>12</sup> Suhardi, Penghulu KUA Marpoyan Damai, *Wawancara*, 27 Desember 2017.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana verifikasi syarat adil bagi saksi nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana penerapan syarat adil bagi saksi nikah dalam pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan syarat adil bagi saksi nikah dalam pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru ?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui verifikasi syarat adil bagi saksi nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui penerapan syarat adil bagi saksi dalam pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penerapan syarat adil bagi saksi dalam pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan, informasi baik secara langsung maupun tidak langsung serta pemahaman, adanya sumbangan pemikiran dan pengetahuan. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu Hukum Keluarga.
- b) Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dalam menjalankan proses pernikahan yang sah menurut Islam mengenai konsep keadilan dan harapan adanya standarisasi adil bagi saksi nikah di Kantor Urusan Agama.
- c) Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sosiologis hukum Islam, yaitu penelitian hukum dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan.<sup>14</sup> Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu, dan Staf Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Pekanbaru guna mendapatkan data primer.

---

<sup>14</sup> Marsi Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di tiga tempat Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Pekanbaru, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota yang beralamat di Jl. Kartini No. 01 Pekanbaru, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan yang beralamat di Jl. Rajawali Sakti No. 40 Tampan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai yang beralamat di Jl. Kaharuddin Nst. No. 148 Marpoyan Damai.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu, dan Staf Administrasi Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru.

### b. Objek Penelitian

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan syarat adil bagi saksi nikah dalam pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Pekanbaru.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 78 orang yang terdiri dari 12 orang Kepala Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah, 23 orang Penghulu, dan 43 orang Staf Jabatan Fungsional Umum Administrasi Nikah pada 12 Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sedangkan sampel pada penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah (PPN), 1 orang Penghulu, dan 1 orang Staf Jabatan Fungsional Umum Administrasi Nikah di setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Tampan, dan Marpoyan Damai yang mengawasi dan mencatat perkawinan, dengan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata.<sup>15</sup>

5. Sumber Data

a. Data primer

Suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada Kepala KUA / Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu, dan Staf Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Suatu data yang diambil sebagai penunjang, data sekunder dari penelitian ini bersumber yang terdiri dari:

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan data yang mengikat diadakannya penelitian yaitu Al-Qur'an, Hadits, kitab *Fiqih Sunnah*, *Fat-hul Mu'in*, *Bidayatu'l Mujtahid*, dan *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu tafsir, syarah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- 3) Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder yaitu segala hal yang dapat menunjang penulisan ini, diantaranya kamus-kamus seperti *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, dan juga ensiklopedi hukum Islam.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung tentang masalah yang diteliti.
- b. Teknik wawancara, yaitu teknik dengan mewawancarai informan dengan memberikan beberapa pertanyaan secara sistematis dan telah disiapkan sebelumnya yang berupa pedoman wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan teknik wawancara akan lebih memudahkan mendapatkan informasi yang diinginkan.
- c. Dokumentasi, yaitu segala sumber data yang tertulis dalam penelitian serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian yang dapat membantu penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Teknik Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan, mengingat bahwa data deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara.
- b. Deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>16</sup>
- c. Induktif, yaitu proses berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang khusus atau peristiwa yang konkrit. Kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa khusus atau konkrit tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Suatu generalisasi dikenakan pada peristiwa-peristiwa khusus dimana generalisasi itu diambil, maka harus ada kecocokan hakekat.<sup>17</sup>

## 8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan dengan kata-kata atau kalimat para informan dari tiga tempat

<sup>16</sup> Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), cet. ke-1, h. 40.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Urusan Agama di Kota Pekanbaru yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Tampan, dan Marpoyan Damai tentang verifikasi dan penerapan terhadap syarat adil bagi saksi nikah menurut ulama yang ada dalam kitab fiqh dan yang tercantum di dalam peraturan perundangan seperti Kompilasi Hukum Islam.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis mengemukakan garis-garis besar pembahasan skripsi ini yang terdiri dari beberapa bab.

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari: berdirinya Kantor Urusan Agama, struktur organisasi, dan mekanisme kerja Kantor Urusan Agama.

Bab III, Tinjauan umum tentang persaksian dalam pernikahan, membahas tentang: pengertian saksi nikah, pendapat ulama tentang persaksian dalam pernikahan, syarat-syarat yang wajib dipenuhi pada persaksian dalam hukum Islam (fiqh), dan syarat adil saksi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, serta teori tentang keadilan bagi saksi nikah.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan: verifikasi syarat adil bagi saksi nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru, penerapan syarat adil bagi saksi dalam pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru, dan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis hukum Islam terhadap penerapan syarat adil bagi saksi nikah dalam pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru.

Bab V, Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat dengan pokok masalah. Kesimpulan adalah jawaban masalah berdasarkan data yang diperoleh.

